

ABSTRAK

Dalam beberapa aturan perlindungan warisan bawah air yang ada baik yang mengatur secara internasional maupun nasional di negara Indonesia tidaklah keluar dari prinsip umum yang ada antara *In situ Preservation* dan *Ex situ Preservation*. Dibarengi dengan kemajuan teknologi yang menakjubkan dewasa ini yang telah membawa persoalan-persoalan baru bagi hukum Internasional maupun nasional terkhusus Indonesia dalam kaitannya tentang perlindungan warisan budaya bawah air. Maka diperlukan suatu rumusan hukum baru di dalam aturan hukum Indonesia yang bisa diakui oleh hukum Internasional terkait *Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage*.

Melalui pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, dengan menelaah segala permasalahan berdasarkan peraturan hukum yaitu hukum internasional dan hukum nasional yang berlaku terkait dengan penulisan skripsi ini, diantaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, dan Konvensi Internasional yang terkait dengan perlindungan dan pelestarian Kekayaan Warisan Budaya Bawah Air. Serta menelaah konsep-konsep keadilan berdasarkan doktrin-doktrin hukum sebagai dasar penyelesaian masalah.

Diharapkan berdasarkan besarnya manfaat yang akan diperoleh Indonesia dengan terlibat dalam konvensi perlindungan cagar budaya bawah air *UNESCO* akan menuai sebuah hasil suatu perundang-undangan yang mampu mengakomodir penggunaan 2 prinsip yaitu *In Situ* dan *ex situ Preservation* sehingga upaya perlindungan secara yuridis yang cukup dalam upaya perlindungan dan pelestarian warisan budaya bawah air di Indonesia.

Keyword : Warisan budaya bawah air, *in situ preservation*, *ex situ preservation*, Cagar budaya Indonesia

ABSTRACT

The principle of In situ and Ex situ Preservation are used in existing both international and Indonesia national underwater heritage protection regulations. Along with today's astonishing technological advances that have brought new issues to Indonesia's international and national law in relation to the underwater cultural heritage, a new legal formulation is needed in Indonesia national law that can be recognized by International law related to the Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage.

This thesis uses a study approach by reviewing all matters based on related rules of law that are both international law and applicable national law such as law of the Republic of Indonesia Number 11 Year 2010 concerning heritage, and international convention related to protection and preservation of underwater cultural heritage. This thesis also uses a conceptual approach by analyzing the concept of justice according to legal doctrines as a basis to solve problems.

It is expected that based on the amount of benefits to be gained by Indonesia by engaging in the UNESCO underwater heritage protection convention will reap a result of a legislation capable of accommodating the use of two principles, namely In situ and Ex situ Preservation so as to protect sufficiently juridical protection in the protection and preservation of underwater cultural heritage in Indonesia.

Keyword : *underwater cultural heritage, in situ preservation, ex situ preservation, Indonesia heritage.*